



Dispute in the South China Sea between America and China

Zahran Hilman Salim B.Pawe^{1*}, Seniwati Seniwati²

¹⁻² Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan 90245

Korespondensi penulis: zahranpawe@gmail.com*

Abstract. *The South China Sea dispute is one of the most complex and strategic geopolitical conflicts, involving rivalry between the United States and China, as well as a number of countries in the region. The strategic geographical position of the South China Sea as the world's main shipping lane, the wealth of natural resources such as oil and gas, and the overlapping claims over the exclusive economic zone (EEZ) make it an area with very high economic, political and military interests. From a political perspective, the conflict reflects a global power struggle, in which China is strengthening its claim through infrastructure development, military modernization, and an aggressive foreign policy under the leadership of Xi Jinping. On the other hand, the United States, along with strategic alliances such as the Quad, seeks to contain China's expansion by increasing its military presence in the Indo-Pacific region. This rivalry is exacerbated by regional dynamics involving ASEAN countries, as well as the struggle for global influence between the two major powers. This research analyzes the main factors influencing the escalation of the South China Sea dispute, including the role of geopolitics in the disputes, including their geopolitical, economic and military roles, and their implications for regional stability and the global balance of power. The study provides a comprehensive insight into a conflict that not only affects the main actors, but also the international security architecture.*

Keywords: South China Sea, geopolitics, United States, China, economic zone, territorial conflict, Indo-Pacific, regional stability, Quad, global rivalry.

Abstrak: Sengketa Laut China Selatan merupakan salah satu konflik geopolitik paling kompleks dan strategis, yang melibatkan rivalitas antara Amerika Serikat dan China, serta sejumlah negara di kawasan. Posisi geografis Laut China Selatan yang strategis sebagai jalur pelayaran utama dunia, kekayaan sumber daya alam seperti minyak dan gas, serta klaim tumpang tindih atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) menjadikannya wilayah dengan kepentingan ekonomi, politik, dan militer yang sangat tinggi. Dari perspektif politik, konflik ini mencerminkan persaingan kekuatan global, di mana China memperkuat klaimnya melalui pembangunan infrastruktur, modernisasi militer, dan kebijakan luar negeri yang agresif di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Di sisi lain, Amerika Serikat, bersama aliansi strategis seperti Quad, berupaya menahan ekspansi China dengan meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Indo-Pasifik. Rivalitas ini diperburuk oleh dinamika regional yang melibatkan negara-negara ASEAN, serta perebutan pengaruh global antara dua kekuatan besar. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor utama yang memengaruhi eskalasi sengketa Laut China Selatan, termasuk peran geopolitik, ekonomi, dan militer, serta implikasinya terhadap stabilitas kawasan dan keseimbangan kekuasaan global. Kajian ini memberikan wawasan komprehensif tentang konflik yang tidak hanya berdampak pada aktor-aktor utama, tetapi juga terhadap arsitektur keamanan internasional.

Kata Kunci: Laut China Selatan, geopolitik, Amerika Serikat, China, zona ekonomi eksklusif, konflik teritorial, Indo-Pasifik, stabilitas kawasan, Quad, rivalitas global.

1. LATAR BELAKANG

Laut China Selatan merupakan laut marijinal yang merupakan bagian dari Samudra Pasifik Raya, dengan luas 3.500.000 km. Meskipun wilayah geografisnya relatif lebih kecil, minat yang ditimbulkan dari negara-negara adikuasa dunia cukup signifikan.

dikarenakan beberapa alasan. Pertama, laut tersebut diposisikan secara strategis dengan mengacu pada rute perdagangan utama di seluruh dunia sebagaimana ditunjukkan oleh fakta bahwa sepertiga pengiriman dunia harus melewati wilayah tersebut dari dan tujuan negara mereka. Banyaknya transaksi internasional yang terjadi di wilayah tersebut menghasilkan sekitar US \$3 triliun dalam setahun, sebagian penjelasan untuk meningkatnya minat masyarakat internasional di wilayah tersebut. Lebih jauh, wilayah tersebut menyimpan cadangan minyak dan gas yang belum dimanfaatkan dalam jumlah besar dari dasar lautnya. Posisi strategis wilayah tersebut serta kekayaan sumber daya alamnya menjelaskan bahwa meningkatnya minat di wilayah pasifik tersebut (Teixeira, 2019).

Laut Cina Selatan telah menjadi arena persaingan kepentingan berbagai negara, menjadikannya salah satu isu keamanan regional paling kompleks di dunia. Hingga saat ini, konflik tersebut belum menemukan solusi yang tuntas, sehingga berpotensi mengancam stabilitas kawasan di masa depan. Konflik ini berakar pada klaim sepihak oleh Cina yang memperluas yurisdiksi maritimnya hingga memasuki wilayah perairan negara-negara seperti Filipina, Taiwan, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan potensi perebutan wilayah yang signifikan, diperlukan penyelesaian yang berkelanjutan dan bersifat mengikat bagi semua pihak (Mandagie, 2022).

Klaim yang dilakukan oleh Republik Rakyat Cina (RRC) untuk wilayah Laut Cina Selatan telah melampaui batas dan tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara-negara lain seperti Brunei, Malaysia, Indonesia, Taiwan, Filipina, dan Vietnam. Diperkirakan bahwa 11 miliar barel cadangan minyak yang belum tergali dan 190 triliun kaki kubik gas alam tersembunyi di bawah kedalaman Laut Cina Selatan. Sejak awal 1970-an, Republik Rakyat Cina (RRC) telah mulai mengklaim seluruh area pulau dan berbagai zona di Laut Cina Selatan yang mengandung kekayaan besar sumber daya alam dan area penangkapan ikan yang luas Amerika Serikat, dengan tindakannya, telah menyatakan dukungannya untuk perjanjian mengenai kode etik yang mengikat dan langkah-langkah pembangunan kepercayaan lainnya, yang mempertahankan kepentingan vital dalam menjaga kebebasan navigasi dan melindungi jalur komunikasi laut (SLOC) (Council on Foreign Relations, 2018).

Klaim China mengancam SLOC, yang merupakan jalur maritim penting yang memfasilitasi perdagangan dan pergerakan angkatan laut. Amerika Serikat memiliki peran untuk dimainkan dalam menghindari sengketa teritorial yang muncul dari eskalasi militer. Republik Rakyat Cina (RRC) dan Amerika Serikat, sebagai negara

majuterbesardi dunia dan masing-masing negara paling maju yang pernah ada di dunia, memegangposisi penting di dunia serta di setiap fokus seperti ekonomi, teknologi, danmiliter. Hubungan antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina (RRC) adalah salahsatuhubungan yang paling kritis dan penting di dunia (Friedberg, 2005).

Menurut Friedberg, hubungan antara keduanya sebagai dua raksasa kekuatanPasifik sangat krusial untuk keamanan, kemakmuran, dan masa depan Asia Pasifikdanbahkan untuk dunia secara keseluruhan. Selain itu, menurut Morrison (2011), hubunganyang semakin dalam antara AS dan RRC dapat membawa peningkatan kapasitas untukpertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan. Masa lalu hubungan merekamenunjukkan bahwa, pada waktu yang berbeda, hubungan itu penuh dengan liku-liku. Jenis hubungan ini diambil ke tingkat berikutnya yang sekarang dikenal sebagai sengketa teritorial yang terjadi di Laut Cina Selatan dan dilaporkan oleh banyak situs berita dalam berbagai pernyataan dan ideologi berdasarkan fokus bahasa berita yang memiliki diskursus di balik setiap teks yang diproduksi oleh situs berita tersebut (Pradana&Suprayogi, 2021, p. 2).

Selama tiga dekade terakhir, Cina telah membuat kemajuan luar biasa dalam modernisasi militernya. Kemajuan tersebut terjadi meskipun alokasi anggaranyangdiberikan pemerintah Cina untuk program tersebut jauh lebih rendah, sebagaimanaterungkap dalam kebijakan transparansi negara tersebut, dibandingkan dengan pendanaan militer Amerika Serikat yang besar tanpa pengungkapan apa pun. Selain kebangkitanTiongkok, negara tersebut semakin terlibat dalam intervensi diplomatik bertujuan untuk mencapai perdamaian di kawasan yang baru-baru ini terlibat dalam pertikaian. Keterlibatan Cina dalam masalah internasional di kawasan seperti Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tenggara menunjukkan kematangan politik yang telah dicapai oleh negara tersebut selama bertahun-tahun. Hal ini berarti sebagai pergeseran kesetimbangan kekuasaan oleh Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Asia Pasifik (Teixeira, 2019).

Amerika Serikat telah meningkatkan kehadiran militernya di Laut Cina Selatan serta kritik terhadap tindakan Cina. Kehadiran Amerika sebagai dukungan kepada negara-negara pengklaim di Asia Tenggara, Washington telah menyelaraskan kebijakan Laut Cina Selatan dengan putusan Pengadilan Arbitrase 2016 (Storey, 2020). Kekuatan tradisional, termasuk Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, merasa terancam oleh kebangkitan ekonomi Asia, yang dipimpin oleh Cina. Hal ini mengakibatkan bahwa negara-negara tersebut waspada untuk melawan kebangkitan lebih lanjut yang mungkin akan menantang status quo atau terjadi pergeseran kekuasaan dan kendali dunia (Teixeira, 2019).

Laut Cina Selatan telah menjadi medan persaingan geopolitik yang semakin intens antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dengan kepentingan strategis yang saling bertentangan. Amerika Serikat, sebagai kekuatan tradisional, telah meningkatkan kehadiran militernya di kawasan ini sebagai respons terhadap tindakan agresif Tiongkok. Langkah ini tidak hanya mencerminkan upaya Washington untuk melindungi kebebasan navigasi tetapi juga mendukung negara-negara Asia Tenggara yang menjadi pengklaim wilayah maritim, sesuai dengan putusan Pengadilan Arbitrase 2016. Kritik terhadap Tiongkok yang membangun pulau buatan dan memproyeksikan kekuatan militer di Laut Cina Selatan mempertegas komitmen Amerika Serikat untuk mempertahankan stabilitas kawasan sekaligus mencegah dominasi penuh Tiongkok (Bahri, 2020).

Di sisi lain, kebangkitan ekonomi Tiongkok yang pesat telah memicu kekhawatiran di kalangan kekuatan tradisional, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa. Ketakutan akan pergeseran kekuasaan global memotivasi langkah-langkah strategis untuk menahan pengaruh Tiongkok di Laut Cina Selatan, yang merupakan salah satu jalur perdagangan terpenting dunia. Bagi Tiongkok, kawasan ini tidak hanya penting secara ekonomi tetapi juga memiliki nilai strategis dalam memperkuat posisinya sebagai kekuatan global yang dominan. Dinamika ini menyoroti kompleksitas konflik yang melibatkan faktor politik, ekonomi, dan keamanan, serta menggambarkan strategi kedua negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya di kawasan yang sangat strategis ini (Teixeira, 2019).

Berdasarkan paragraf di atas, penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan yakni faktor utama yang memengaruhi konflik Laut Cina Selatan dari perspektif politik dalam perspektif politik serta strategi Amerika Serikat dan Tiongkok dalam mempertahankan kepentingannya di kawasan tersebut. Hal ini penting untuk dibahas karena titik strategis yang tidak hanya berdampak pada stabilitas regional tetapi juga pada dinamika politik internasional. Konflik ini melibatkan dua kekuatan besar dunia yang bersaing untuk mendominasi kawasan strategis yang kaya sumber daya dan menjadi jalur perdagangan global utama. Selain itu, strategi yang digunakan oleh Amerika Serikat dan Tiongkok mencerminkan bagaimana rivalitas kekuatan besar ini memengaruhi tatanan global dan menciptakan potensi eskalasi konflik yang dapat berdampak luas, termasuk terhadap negara-negara pengklaim lain di Asia Tenggara. Dengan memahami aspek ini, penelitian dapat memberikan kontribusi untuk mengurai kompleksitas sengketa dan implikasinya terhadap stabilitas kawasan dan tata kelola dunia.

2. KAJIAN TEORITIS

Sebelum menjawab pertanyaan penelitian akan ditelaah lebih lanjut tulisan-tulisan terdahulu yang membahas Sengketa Laut China Selatan. Dalam artikel jurnal yang berjudul “Cooperation & Security Dilemma in the South China Sea: Conflict Management & the Increasing of China’s Power”. Tulisan ini memaparkan bahwa berdasarkan konsep dilemma keamanan oleh Robert Jerwis dalam melihat kekuatan Tiongkok untuk menguasai wilayah perairan Laut China Selatan. Adapun kekuatan yang dimaksud adalah melalui kekuatan militer yang semakin ofensif (Widian & Arimadona, 2018).

Selain itu dalam artikel yang berjudul “The United States’ China Containment Strategy and the South China Sea Dispute” karya Victor Teixeira menjelaskan tentang strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina dalam menghadapi sengketa Laut Cina Selatan. Artikel tersebut menggunakan teori hegemoni dalam menjawab strategi AS di Laut China Selatan bertujuan mempertahankan status quo sebagai kekuatan global dominan, sedangkan China berusaha membangun hegemoni regional untuk menantang dominasi AS. Persaingan ini menciptakan ketegangan geopolitik yang tidak hanya melibatkan kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga perang ideologi dan legitimasi di mata dunia internasional (Teixeira, 2019).

Pembahasan mengenai faktor utama yang memengaruhi konflik Laut Cina Selatan dari perspektif politik serta strategi Amerika Serikat dan Tiongkok dapat dianalisis menggunakan teori konflik internasional dan konsep balance of power. Teori konflik internasional dikembangkan untuk memahami bagaimana persaingan antar negara-negara besar dapat memicu ketegangan dalam sistem internasional, terutama ketika ada benturan kepentingan yang saling bertentangan. Dalam konteks Laut Cina Selatan, baik Amerika Serikat maupun Tiongkok berusaha memperkuat posisi strategismereka, yang memicu konflik. Sedangkan konsep balance of power lebih lanjut menjelaskan bahwa kedua negara ini berusaha mempertahankan atau memperluas pengaruh mereka di kawasan tersebut untuk menghindari dominasi satu pihak yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan global. Melalui kebijakan militer, aliansi strategis, dan diplomasi, masing-masing negara berusaha mengendalikan perairan yang sangat penting ini, yang secara langsung memengaruhi stabilitas politik dan keamanan kawasan Asia-Pasifik serta tatanan internasional yang lebih luas.

A. Konflik Internasional

Brown, (1997) mengidentifikasi empat kelompok faktor utama yang membuat beberapa tempat lebih rentan terhadap kekerasan daripada tempat lain. Faktor-faktor ini menurut Brown, sebagaimana dilaporkan Uyangoda, (2005) adalah faktor struktural, faktor politik, faktor ekonomi/sosial. Negara-negara dengan populasi yang sangat bercampur cenderung tidak menghadapi tuntutan pemisahan diri. Namun, jika tuntutan pemisahan diri berkembang di negara-negara dengan populasi yang bercampur, kelompok etnis akan berusaha untuk menguasai wilayah tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan serangan langsung terhadap warga sipil, perang gerilya yang intens, pembersihan etnis, dan bahkan genosida (Malam, 2020, pp. 1-2).

Di Afrika, sebagian besar konflik disebabkan oleh keruntuhan sistem dan kelemahan negara-negara, terutama setelah perang dingin berakhir menyusul penarikan perlindungan dan dukungan yang diterima kelas penguasa dari negara-negara adikuasa untuk mendukung negara mereka masing-masing. Lebih dari itu, garis patahan dalam arsitektur Negara Afrika pasca-kolonial; dan kerentanan benua terhadap keanehan proses dan alam global, seperti wilayah tersebut memiliki posisi yang kurang menguntungkan di pasar dunia dan degradasi lingkungan. Akar penyebab konflik kekerasan, seperti kemiskinan, pengucilan, kesenjangan gender dan politik/ekonomi dapat ditelusuri kembali ke faktor-faktor penyebab global dan lokal ini garis-garis tersebut selalu menjadi bom waktu dalam proses tata kelola di Afrika Barat, karena menjadi sumber utama kekerasan laten dan tidak langsung (Aninget al., 2010) (Malam, 2020, pp. 1-2).

Faktor Politik : Empat faktor politik utama telah disorot dalam literatur ilmiah tentang konflik internal: lembaga politik yang diskriminatif, ideologi nasional yang eksklusif, politik antar kelompok, dan politik elit. Seiring berjalannya waktu, legalitas sistem secara keseluruhan dapat dipertanyakan. Kedua, ideologi nasionalisme dan kewarganegaraan yang eksklusif, yang didasarkan pada perbedaan etnis, menimbulkan kebencian minoritas dan bahkan perlawanan. Ketiga, banyak akademisi berpendapat bahwa prospek pertikaian yang disertai kekerasan sangat bergantung pada seluk-beluk politik domestik dan antar kelompok (Malam, 2020, p. 2)

Faktor Ekonomi dan Sosial : Tiga faktor ekonomi dan sosial yang luas dapat diidentifikasi sebagai sumber potensial konflik internal masalah ekonomi,

sistem ekonomi diskriminatif, dan konsekuensi negatif dari pembangunan ekonomi dan modernitas. Di antara masalah ekonomi kontemporer yang menyebabkan konflik internal dan kekerasan adalah reformasi ekonomi yang menghasilkan kesenjangan sosial, perlambatan ekonomi, stagnasi, dan, seperti dalam beberapa kasus di negara berkembang, keruntuhan ekonomi (Malam, 2020, p. 2).

Faktor Budaya/Persepsi : Dua faktor budaya dan persepsi telah diidentifikasi. Yang pertama adalah diskriminasi budaya terhadap kaum minoritas. Sumber kedua adalah faktor persepsi. Kleiboer, (1996), berpendapat bahwa konflik biasanya termasuk dalam kelompok berikut: Masalah dominasi (faktor struktural); Masalah filosofis (faktor politik dan budaya) (Malam, 2020, p. 2).

Teori konflik biasanya berupaya untuk mengklarifikasi secara metodis penggambaran keseluruhan pertikaian dalam peradaban. Para filsuf konflik biasanya berupaya dengan tiga skema stratifikasi Weber: kelas, status, dan kekuasaan. Di sini, kekuasaan umumnya diperlakukan sebagai ciri utama masyarakat. Kekuasaan juga bertindak sebagai seperangkat standar budaya yang kohesif. Lokasi dan penggunaan kekuasaan merupakan salah satu komponen utama teori konflik. Kekuasaan juga bertindak sebagai faktor utama yang mengarahkan masyarakat dan hubungan sosial (Malam, 2020, p. 2).

Cunningham, (1998) menyoroti bahwa salah satu anggapan terpenting adalah bahwa penyebab utama perang disebabkan oleh sifat dan perilaku manusia. Para ahli perilaku, ahli biologi, dan psikolog telah membahas berbagai konsekuensi yang mungkin terjadi pada perilaku manusia melalui studi perilaku hewan atau etologi (O'Connell, 1989). Pernyataan Seville menyarankan bahwa akuntabilitas baru dalam perilaku kelompok manusia harus dipraktikkan (Mack, 1990). Seperti kebanyakan teori yang inovatif, teori bawaan atau normal memberi jalan bagi hipotesis yang lebih berbudaya dan sistematis dari waktu ke waktu. Salah satu perkembangan terpenting adalah pengembangan teori frustrasi-agresi (Malam, 2020, p. 2). Perilaku manusia bisa diteliti melalui studi perilaku hewan atau etologi, Seville menyarankan akuntabilitas baru dalam perilaku kelompok manusia harus dipraktikkan (Raymond & Welch, 2022).

Dalam lingkungan, lembaga atau organisasi apapun, konflik tidak dapat dihindari karena adanya perbedaan ide, keinginan, persepsi, dan kebutuhan individu. Secara umum, konflik didefinisikan sebagai keadaan antagonistik berupa pertentangan, ketidaksetujuan, atau ketidakcocokan antara dua pihak atau lebih (Patzak,

2012&Wilmont dan Hocker, 2001). Conrad (1991) menyatakan bahwa konflik terjadi sebagai akibat interaksi antara orang-orang yang saling bergantung yang merasa bahwa kepentingan mereka tidak sesuai, tidak konsisten, atau bersitegang; Lewis Coser, (1956), seorang sosiolog Amerika, mendefinisikan konflik sebagai benturan nilai dan kepentingan, ketegangan antara apa yang ada dan apa yang menurut beberapa kelompok seharusnya. Mengenai definisi ini, konflik memiliki fungsi mendorong masyarakat dan mengarah pada sistem ekonomi, teknologi, dan lembaga baru; kontribusinya adalah ia menentukan peran fungsional dan disfungsional yang dapat dimainkan oleh konflik (Hussein & Al-Mamary, 2019, p. 2).

Perang dalam Hubungan Internasional. Lopez dan Johnson (2019) membahas konflik dan perang dari perspektif ilmu politik dan hubungan internasional. Mereka mulai dengan menunjukkan bahwa "studi" tentang peperangan dimulai hampir segera setelah praktiknya (Keeley, 1996). Ilmuwan politik menggunakan definisi umum tentang perang, yang berasal dari proyek *Correlates of War*: "Pertempuran berkelanjutan, yang melibatkan pasukan bersenjata yang terorganisasi, yang mengakibatkan sedikitnya 1000 kematian terkait pertempuran dalam jangka waktu 12 bulan" (Sarkees dan Wayman, 2010).

Semua teori perang terkemuka dalam ilmu politik berfokus pada tiga jenis variabel yang mempengaruhi pecahnya perang: atribut sistem internasional, atribut organisasi domestik negara, dan atribut individu. Dalam mengkaji teori-teori ini, ilmuwan politik paling sering menggunakan analisis statistik n-besar dan model teori permainan. Satu pengamatan penting yang muncul dari literatur ini adalah bahwa sejak 1945, perang antar negara telah menurun, sementara jumlah perang intranegara (perang saudara) telah meningkat secara dramatis. Pengamatan penting lainnya adalah bahwa PDB merupakan korelasi yang konsisten (negatif) dari perang saudara (Kimbrough & Sheremeta, 2019, p. 4).

Faktor utama yang memengaruhi konflik Laut Cina Selatan dari perspektif politik dapat dijelaskan dengan menggunakan teori konflik internasional yang melihat persaingan kekuasaan antar negara sebagai penyebab utama ketegangan. Teori ini mengidentifikasi tiga variabel yang menjadi kunci dalam memicu perang: atribut sistem internasional, atribut organisasi domestik negara, dan atribut individu. Dalam konteks Laut Cina Selatan, atribut sistem internasional memainkan peran penting, di mana ketegangan global, seperti kebangkitan ekonomi Tiongkok dan kekhawatiran Amerika

Serikat terhadap pergeseran kekuasaan dunia, menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif bagi persaingan. Persaingan ini menyebabkan negara-negara besar berusaha mengamankan kepentingan strategis mereka di kawasan yang kaya akan sumber daya alam dan jalur perdagangan utama ini. Selain itu, atribut organisasi domestik negara, seperti kebijakan luar negeri Tiongkok yang semakin ekspansif dan respons militer Amerika Serikat, turut memperburuk ketegangan tersebut, dengan masing-masing negara mengerahkan kekuatan untuk menjaga dominasi mereka di Laut Cina Selatan.

B. Balance of Power

Balance of Power merupakan sebuah konsep dalam hubungan internasional yang menjelaskan bagaimana negara-negara berusaha melindungi kepentingannya dengan menyeimbangkan kekuatan terhadap rivalnya. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menjalin aliansi strategis antarnegara, memperkuat kekuatan militer, atau memperluas wilayah kekuasaan. Namun, dinamika perimbangan kekuatan mengalami perubahan signifikan sebelum dan setelah Perang Dunia. Pasca-Perang Dunia, perimbangan kekuatan lebih dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap dampak destruktif senjata modern, sehingga negara-negara lebih cenderung menghindari konfrontasi langsung (Nexon, 2009).

Pada awal tahun 1990-an, banyak akademisi menggunakan logika balance of power untuk menyatakan bahwa berakhirnya bipolaritas perang dingin akan menghasilkan distribusi kekuatan multipolar baru. Namun dengan sedikit bukti yang menunjukkan munculnya keseimbangan tradisional yang merugikan Amerika Serikat, bahkan sejumlah realis kini mempertanyakan aspek-aspek penting dari teori balance of power (Nexon, 2009).

Teori transisi kekuasaan dan teori tatanan hegemonik semakin mendapatkan perhatian di kalangan analis keamanan internasional dan perencana strategi besar. Dalam pembahasan mereka, William Wohlforth bersama para kolaboratnya menyoroti bahwa hasil penelitian mereka mengenai dinamika sistem internasional dan perilaku negara justru bertentangan dengan asumsi inti dari teori balance of power. Mereka menyatakan bahwa "perilaku penyeimbangan tidak selalu berhasil mencegah munculnya hegemoni dalam sistem internasional" dan bahwa temuan tersebut "secara fundamental menggugurkan pandangan bahwa penyeimbangan adalah hukum universal dalam sistem multipolar. Namun, alih-alih meninggalkan teori Balance of Power sepenuhnya, beberapa ahli justru mendorong perluasan konsep ini. Mereka mengusulkan pengembangan kategori baru, seperti soft balancing dan

asymmetricbalancing, untuk menangkap variasi strategi negara-negara dalam menyeimbangkan kekuatan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kompleksitas interaksi kekuasaan di antara negara-negara dalam sistem internasional modern (Nexon, 2009).

Para pendukung teori balance of power berpendapat bahwa dalam politik dunia, terdapat berbagai mekanisme yang secara alami menciptakan tekanan untuk membentuk pola keseimbangan kekuatan yang terus berulang dalam sistem internasional. Mekanisme ini bisa berasal dari tingkat individu pembuat keputusan, seperti kecenderungan manusia untuk mengejar kekuasaan demi kepentingan pribadi, atau dari lingkungan internasional itu sendiri. Meskipun ada penjelasan yang mengaitkan keseimbangan kekuatan dengan sifat dasar manusia, pandangan ini hanya memiliki peran kecil dalam diskusi teori hubungan internasional saat ini dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut di sini (Nexon, 2009).

Definisi teori keseimbangan kekuatan seperti ini menunjukkan perbedaan dari pendekatan yang lebih umum dalam memahaminya. Perbedaan utama di antara teori-teori keseimbangan kekuatan bukanlah pada apakah teori tersebut bersifat mutlak atau bersyarat. Sebaliknya, semua teori sepakat bahwa mekanisme dan proses yang relevan bersifat tidak bersyarat—artinya, tetap konsisten melintasi waktu dan tempat. Namun, teori-teori tersebut berbeda dalam hal sifat mekanisme dan proses itu sendiri serta, yang lebih penting, kekuatan relatif dari mekanisme dan proses tersebut dalam menghasilkan berbagai hasil (Levy, 2004).

Pada akhir abad ke-20, banyak negara dunia ketiga mulai menolak dominasi dan pengaruh negara-negara adidaya. Runtuhnya Uni Soviet sempat memunculkan anggapan bahwa teori keseimbangan kekuatan telah kehilangan relevansinya, karena tidak lagi ada dua kekuatan besar yang saling bersaing secara seimbang. Namun, realitas menunjukkan bahwa konsep ini tidak sepenuhnya hilang, melainkan berubah dalam skala yang lebih kecil. Misalnya, konflik bersaudara di Korea yang berakir dalam kondisi stalemate menciptakan keseimbangan kekuatan lokal, meskipun perang tersebut secara teknis belum usai hingga kini. Hal serupa juga terlihat dalam sengketa Laut China Selatan, termasuk Laut Natuna. Meskipun China telah tumbuh menjadi kekuatan global, tindakan militernya tetap dibatasi oleh berbagai faktor strategis dan diplomatik yang melibatkan negara-negara yang bersengketa, termasuk Indonesia.

Perselisihan ini kemungkinan besar tidak akan segera terselesaikan, karena Chinateguh pada klaimnya, sementara negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, tetap mempertahankan posisi mereka. Meski demikian, potensi pecahnya perang terbuka tetap rendah, karena berbagai pertimbangan politik, ekonomi, dan keamanan yang menciptakan keseimbangan dinamis antara pihak-pihak yang terlibat. Meski demikian, potensi pecahnya perang terbuka tetap rendah, karena berbagai pertimbangan politik, ekonomi, dan keamanan yang menciptakan keseimbangan dinamis antara pihak-pihak yang terlibat (Utami, 2012).

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan, teori *balance of power* relevan digunakan untuk menganalisis strategi Amerika Serikat di Laut China Selatan. Teori ini menekankan pentingnya distribusi kekuatan yang seimbang untuk mencegah dominasi tunggal oleh satu aktor, sehingga menciptakan stabilitas internasional. AS, sebagai kekuatan global dominan, menggunakan berbagai strategi seperti memperkuat aliansi dengan negara-negara di kawasan, meningkatkan kehadiran militer, dan membangun kerja sama ekonomi untuk mempertahankan status quo. Pendekatan ini bertujuan mengimbangi pengaruh China yang terus berkembang, sembari menunjukkan komitmen AS terhadap tatanan internasional berbasis aturan.

Di sisi lain, China memanfaatkan kekuatan ekonominya dan modernisasi militernya untuk membangun hegemoni regional di Asia Pasifik, khususnya di Laut China Selatan. Upaya ini termasuk mengklaim wilayah secara agresif melalui proyek reklamasi dan militerisasi pulau-pulau sengketa, serta meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara ASEAN untuk memperkuat pengaruhnya. Dalam kerangka *balance of power*, tindakan China ini merupakan tantangan langsung terhadap dominasi AS. Kedua kekuatan besar ini, meskipun bersaing, tampaknya berhati-hati untuk tidak melampaui batas yang dapat memicu konflik berskala besar, sehingga menciptakan hubungan yang kompleks namun stabil dalam dinamika geopolitik kawasan (Teixeira, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kajian pustaka sebagai pendekatan utama. Pendekatan ini bertujuan untuk menghimpun dan menganalisis berbagai literatur yang relevan untuk memahami faktor-faktor utama yang memengaruhi dinamika konflik di Laut Cina Selatan, terutama dari sudut pandang politik. Selain itu, penelitian ini juga membahas strategi yang diterapkan oleh Amerika

Serikat dan Tiongkok dalam upaya mempertahankan kepentingan nasional mereka di kawasan tersebut. Analisis strategi kedua negara besar ini tidak hanya mengungkap rivalitas antaradua kekuatan global, tetapi juga menunjukkan dampaknya terhadap tatanan dunia. Rivalitas ini menciptakan potensi eskalasi konflik yang memiliki implikasi luas, baik bagi stabilitas kawasan maupun bagi negara-negara pengklaim lain di Asia Tenggara. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana rivalitas geopolitik Amerika Serikat dan Tiongkok dapat memengaruhi stabilitas regional dan global.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Utama yang Memengaruhi Sengketa Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat dan China berdasarkan Perspektif Politik

Laut China Selatan merupakan kawasan yang sangat strategis dan memiliki daya tarik besar, baik dari sisi geopolitik maupun ekonomi. Dalam konteks sengketa wilayah, dua faktor utama yang memicu perebutan ini adalah posisi geografis yang sangat vital dan potensi ekonominya yang luar biasa. Dari sudut pandang strategis, perairan ini menjadi salah satu jalur pelayaran utama yang menghubungkan berbagai negara besar dan merupakan jalur logistik yang sangat penting untuk perdagangan global. Laut China Selatan juga berfungsi sebagai penghubung utama antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, menghubungkan wilayah Asia Timur dengan India, Asia Barat, Eropa, dan Afrika, sehingga menjadikannya sebagai jalur transportasi yang tak tergantikan (Mandagie, 2022).

Ketegangan di Laut China Selatan telah berkembang sejak era Perang Dingin, dipicu oleh berbagai faktor yang saling berhubungan, seperti pesatnya pertumbuhan ekonomi dan modernisasi militer di China, persaingan sumber daya maritim, serta posisi China sebagai kekuatan yang terus berkembang. Selain itu, persaingan antarkekuatan besar, terutama dengan Amerika Serikat, semakin memperburuk situasi. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, kebijakan luar negeri China semakin tegas, memperburuk ketegangan terkait klaim teritorial dan hak maritim. Aspek lain yang memperburuk konflik ini adalah pembangunan yang dilakukan China di wilayah yang disengketakan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, sengketa teritorial juga melibatkan persaingan klaim atas pulau-pulau, bebatuan, dan terumbu karang yang ada di Laut China Selatan (Hidayat et al., 2024).

Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, setiap negara yang berdaulat memiliki hak untuk mengklaim zona ekonomi eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut dari garis pangkal pantaunya, serta wilayah perairan hingga 12 mil laut. Dalam batasan ini, negara tersebut berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam, melaksanakan aktivitas kelautan dan perikanan, serta membangun pulau-pulau buatan. Namun, klaim ini sering kali menjadi sumber ketegangan, terutama ketika beberapa negara memiliki klaim yang tumpang tindih di wilayah yang sama, yang memperburuk sengketa teritorial dan memperburuk stabilitas kawasan (Hidayat et al., 2024)

Secara geografis, Laut China Selatan memegang peran yang sangat penting bagi Tiongkok, baik dari sisi strategis maupun militer. Posisi Laut ini memberikan keuntungan besar bagi Tiongkok dalam hal penguatan keamanan nasional. Selain itu, perairan ini kaya akan sumber daya alam, termasuk mineral, minyak, dan gas, yang semakin memperbesar nilainya. Laut China Selatan juga menjadi jalur pelayaran yang sangat sibuk, dengan volume perdagangan mencapai \$5,3 triliun per tahun, hampir sepertiga dari seluruh perdagangan maritim dunia. Di sisi lain, sengketa terkait sumber daya minyak dan gas di kawasan ini menjadi salah satu pemicu utama konflik. Jika kita menyoroti klaim atas kedaulatan pulau-pulau, dangkalan, dan atol di Kepulauan Nansha, kita tidak bisa mengabaikan bahwa perebutan sumber daya alam ini adalah faktor kunci yang memperburuk ketegangan dan menjadikannya sebagai titik sentral dalam konflik yang melibatkan berbagai pihak (Hidayat et al., 2024).

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang secara terbuka menentang pengaruh Tiongkok di kawasan, didukung oleh sekutunya seperti Filipina dan Taiwan. Sejak lama, Washington berupaya mengurangi dominasi Tiongkok di kawasan tersebut, mengingat pentingnya jalur maritim ini bagi perdagangan AS. Sebagai respons, Pentagon memfokuskan perhatian pada Samudra Pasifik dan membentuk Komando Indo-Pasifik untuk melawan ekspansi pengaruh Tiongkok. Lebih lanjut, negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India bergabung dalam aliansi "Quad", yang tidak hanya melakukan latihan militer bersama, tetapi juga berusaha menanggulangi dominasi Beijing di Laut China Selatan.

Dampak dari ketegangan di Laut Cina Selatan ini semakin meningkat seiring dengan tumbuhnya berbagai kekuatan dan kepentingan yang bersaing. Apalagi, kemenangan Taliban di Afghanistan, yang lebih menguntungkan Tiongkok dan merugikan Amerika, semakin memperburuk dinamika geopolitik.

Pergeseran kekuasaan ini menambah ketegangan internasional dan regional, yang seringkali tercermin dalam bentuk konflik dan kerusuhan di Laut China Selatan.

B. Strategi Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina dalam Mempertahankan Kepentingan di Laut Cina Selatan

Sebagai negara yang berideologi komunis, Republik Rakyat Cina (RRC) sejak masa lalu telah berupaya menentang dominasi kapitalisme dalam berbagai bentuk. Upaya ini tampak jelas sejak awal 1950-an, ketika pemerintah Cina meluncurkan gerakan untuk menghapuskan kapitalisme di dalam negeri. Kebijakan domestik ini berdampak signifikan terhadap arah kebijakan luar negerinya, yang terus mengalami perubahan seiring dengan kebutuhan strategis Cina di tengah dinamika internasional. Pada masa pemerintahan Mao Zedong, kebijakan luar negeri Cina sangat dipengaruhi oleh teori geopolitik yang ia kembangkan, salah satunya adalah penerapan Teori Dua Kubu yang diadopsi dari Uni Soviet pada 1947. Dalam kerangka teori ini, dunia dipandang terbagi menjadi dua blok utama: kubu sosialis dan kubu imperialis (Sabilla et al., 2022).

Namun, ketidakpuasan terhadap Uni Soviet, yang mulai dirasakan pada akhir 1950-an, mendorong Cina untuk memformulasikan pandangan strategis baru. Pada 1957, Mao memperkenalkan teori Zona Antara, yang menggambarkan wilayah penyangga yang berada di antara dua kekuatan besar pada masa itu, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Zona ini mencakup wilayah jajahan, setengah jajahan, serta negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika. Dalam pandangan Cina, kedua kekuatan adidaya tersebut berupaya menguasai Zona Antara untuk memperluas pengaruh masing-masing. Sebagai respons, Cina mengembangkan strategi permusuhan terhadap kedua negara tersebut, dengan tujuan menjaga kemandirian politik dan memperkuat posisi Cina sebagai pemimpin dunia berkembang (Sabilla et al., 2022).

Pendekatan ini menunjukkan penerapan prinsip *balance of power* dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan Cina. Dengan mengidentifikasi Zona Antara sebagai ruang persaingan antara dua kekuatan besar, Cina memanfaatkan posisi geografis dan politik negara-negara di wilayah tersebut untuk menyeimbangkan kekuatan global. Melalui kebijakan ini, Cina tidak hanya menolak dominasi AS dan Uni Soviet, tetapi juga menciptakan blok strategis yang mendukung tujuannya geopolitik. Strategi ini

menegaskan bagaimana Cina memanfaatkan teori *balance of power* untuk mempertahankan kedaulatan nasionalnya sekaligus memperluas pengaruhnya di panggung internasional (Sabilla et al., 2022).

Saat ini, Xi Jinping memilih untuk melanjutkan perjuangan parapendahulunya dengan mengarahkan fokus pembangunan China ke Laut China Selatan. Xi menyadari pentingnya wilayah ini sebagai jalur perdagangan global yang menghubungkan berbagai benua dan negara. Klaim China atas Laut China Selatan, yang dimulai sejak 1936, semakin jelas dengan diumumkannya doktrin *Nine Dash Line* atau *Zengmu Ansha*. Doktrin ini menjadi dasar klaim teritorial China atas laut dan pulau-pulau di kawasan tersebut. *Zengmu Ansha* bukan hanya sekadar peta, tetapi juga sebuah doktrin yang diinternalisasi oleh pemerintah dan rakyat China, yang menghubungkannya dengan konsep wilayah penangkapan ikan tradisional mereka. Melalui klaim ini, Xi Jinping berusaha menegaskan posisi China di Laut China Selatan, seiring dengan strategi *balance of power* yang berupaya memperkuat pengaruh dan kontrol China tanpa menantang langsung kekuatan besar lainnya (Sabilla et al., 2022).

Diangkat dari teori *balance of power* menjelaskan bagaimana negara-negara berupaya mempertahankan keseimbangan kekuatan untuk mencegah dominasi oleh satu aktor tunggal dalam sistem internasional. Dalam konteks kebijakan keamanan dan doktrin pertahanan Cina, prinsip-prinsip fundamental yang dipegang oleh Cina, seperti kedaulatan, non-intervensi, dan kebangkitan damai, memainkan peran penting dalam memproyeksikan kekuatannya. Cina menggunakan pendekatan ini untuk memastikan bahwa peningkatan pengaruhnya di kawasan tidak langsung mengundang ancaman besar dari kekuatan lain, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya. Dengan demikian, Cina membangun kekuatan secara gradual untuk menyeimbangkan dominasi AS, sembari tetap memanfaatkan narasi penghormatan terhadap hukum internasional dan kerja sama multilateral (Swaine, n.d.).

Selanjutnya adalah pengerahan postur pertahanan dan gelar kekuatan oleh Republik Rakyat Cina di Laut Cina Selatan dapat dipandang sebagai bagian dari strategi pertahanan untuk memperkuat klaim teritorialnya sekaligus menanggapi pengaruh kekuatan eksternal, terutama Amerika Serikat, yang seringkali mengintervensi kawasan tersebut. Melalui militerisasi pulau-pulau buatan dan penempatan infrastruktur pertahanan, China tidak hanya memperlihatkan kemampuannya untuk mempertahankan klaim teritorialnya, tetapi juga berusaha menciptakan ketidakseimbangan kekuatan yang dapat memperlemah posisi

negara-negara lain di kawasan tersebut. Dalam kerangka teori balance of power, langkah ini merupakan upaya China untuk mengimbangi kehadiran militer AS yang terus memperlihatkan dominasi di Laut Cina Selatan, dan pada saat yang sama, menciptakan situasi di mana negara-negara yang memiliki kepentingan di kawasan ini terpaksa beradaptasi dengan kebijakan dan kekuatan China (Sabilla et al., 2022).

Postur pertahanan merupakan elemen penting dari kekuatan suatu negara yang terbentuk melalui proses sosial, yang memiliki dampak terhadap aktor-aktor yang memungkinkan negara tersebut mengendalikan nasibnya. Dalam konteks ini, postur pertahanan menggambarkan kapasitas suatu negara dalam hal kekuatan pertahanan, yang mencakup kemampuan, kekuatan, gelar kekuatan, serta sumber daya nasional. Sebagai bagian dari strategi negara, postur pertahanan disusun sesuai dengan kemampuan militer dan non-militer yang ingin dicapai dalam periode tertentu, serta disesuaikan dengan perubahan dalam lingkungan strategis yang berkembang (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

Pembentukan dan pengembangan postur pertahanan ini didasarkan pada doktrin dan strategi pertahanan yang mempertimbangkan faktor geopolitik dan geostrategi negara. Dalam perspektif balance of power, postur pertahanan berfungsi untuk menjaga keseimbangan kekuatan di tingkat regional maupun global, dengan memastikan negara memiliki kapasitas untuk mengimbangi ancaman atau tekanan dari negara atau aliansi lainnya (Sabilla et al., 2022).

Pembangunan Jalur Sutra Maritim Abad 21 oleh Republik Rakyat Cina (RRC) dapat dianalisis sebagai bagian dari strategi keseimbangan kekuatan yang lebih besar. Melalui inisiatif Belt and Road Initiative (BRI), Cina tidak hanya memperkuat pengaruh ekonomi dan infrastrukturnya di kawasan, tetapi juga memperkuat posisinya dalam menghadapi tantangan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN. Jalur Sutra Maritim, yang menghubungkan Cina dengan negara-negara pesisir Asia, Afrika, dan Eropa, menjadi instrumen strategis untuk memperluas jaringan aliansi dan meningkatkan kontrol atas jalur perdagangan penting, termasuk Laut Cina Selatan. Dengan memperkuat hubungan ekonomi dan politik melalui proyek-proyek infrastruktur, Cina berusaha menciptakan ketergantungan yang lebih besar di kawasan ini, sehingga membatasi pengaruh negara luar dan mengamankan klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan. Inisiatif ini merupakan upaya Cina untuk menyeimbangkan kekuatan di kawasan tersebut, di

mana dominasi Amerika Serikat dan aliansi regional dapat dihadapi dengan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi (Sabilla et al., 2022).

Melalui inisiatif Jalur Sutra Maritim Abad 21, China berupaya memperkuat kerjasama dengan negara-negara yang terhubung sepanjang rute tersebut, dengan tujuan meningkatkan kepercayaan untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran regional. Namun, Jalur Sutra Maritim Abad 21 juga dapat dilihat dari perspektif yang berbeda, yaitu sebagai simbol yang menunjukkan kepada dunia internasional bahwa China berpotensi menjadi salah satu kekuatan besar yang mampu menandingi Amerika Serikat. Lebih dari itu, inisiatif ini dapat berfungsi sebagai titik tawar yang signifikan bagi China untuk mempertahankan klaim teritorialnya di Laut China Selatan (Sabilla et al., 2022)

Di sisi lain, partisipasi Amerika Serikat di Laut Cina Selatan mencerminkan upayanya untuk mempertahankan stabilitas dan keseimbangan di kawasan tersebut. AS berusaha memastikan kebebasan navigasi di wilayah itu, memfasilitasi arus perdagangan tanpa hambatan, dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai antara negara-negara yang terlibat. Menurut Glaser, tujuan utama Amerika Serikat adalah untuk menjaga perdamaian regional dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat meraih keuntungan. Glaser juga menegaskan bahwa kegagalan AS dalam menjalankan peran ini akan melemahkan posisinya sebagai kekuatan dominan di dunia, yang menjelaskan mengapa AS rela menginvestasikan banyak sumber daya untuk mengatasi ketegangan di Laut Cina Selatan (Levy, 2004).

Selanjutnya, Amerika Serikat telah merumuskan strategi untuk memperlambat ekspansi kekuatan China. AS mengimplementasikan kebijakan penahanan, yang bertujuan membatasi perluasan pengaruh China sehingga peluangnya untuk menjadi negara adikuasa semakin berkurang. Sebagai bagian dari kebijakan ini, Amerika Serikat berusaha menjalin perjanjian diplomatik dengan negara-negara di sekitar China, dengan tujuan mengalihkan dukungan mereka kepada AS. Dalam konteks ini, AS memperkuat hubungan dengan negara-negara seperti Vietnam dan India, serta semakin banyak membuat kesepakatan dengan kedua negara tersebut. Langkah ini bukan untuk meningkatkan hubungan internal dengan negara-negara tersebut, melainkan untuk mengurangi dukungan terhadap China dari negara-negara tetangga, guna memastikan bahwa China tidak mendominasi ranah politik dan ekonomi di kawasan tersebut (Levy, 2004).

Cina tumbuh dengan sangat cepat sehingga dapat mengancam dominasi global Amerika Serikat. Dalam menghadapi hal ini, AS menggunakan kebijakan pembatasan

untuk memastikan bahwa pertumbuhan Tiongkok tidak mengganggu perekonomian global, termasuk perekonomian AS. Untuk itu, Amerika Serikat berupaya membatasi pembentukan aliansi yang dapat menguntungkan Tiongkok dengan negara-negara tetangganya. Strategi ini bertujuan agar pertumbuhan Tiongkok didorong oleh prinsip liberalisme, bukan oleh dampak negatif dari imperialisme hegemonik. Dengan mendukung kepentingan liberal, AS dapat mengurangi tekanan ekonomi terhadap Tiongkok dan memberi ruang bagi negara tersebut untuk menjadi penyedia utama keamanan ekonomi di Asia Timur. Meskipun ada ketegangan ekonomi antara kedua negara, Tiongkok menerimatawaran AS dengan membuka secara perlahan pasar ekonominya dan memperbaiki lembaga-lembaga internasional, terutama yang berkaitan dengan posisi ekonominya di Asia Timur (Levy, 2004).

Berdasarkan perkembangan terakhir, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat semakin tegang, yang mencerminkan ketidakseimbangan kekuatan antara kedua negara. Pada tahun 2017, Menteri Luar Negeri AS yang baru terpilih menyatakan bahwa Tiongkok harus menghentikan pembangunan di pulau-pulau mereka di Laut Cina Selatan dan melarang akses AS ke pulau-pulau tersebut. Sebagai balasan, Beijing menegaskan bahwa kecuali Amerika Serikat melancarkan perang, pembangunan di wilayah tersebut tidak akan dihentikan. Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan ketegangan yang meningkat, dimana kedua negara menegaskan kesiapan untuk mempertahankan kepentingannya, yang jika tidak ditangani dengan hati-hati, dapat memicu konflik terbuka. Dalam konteks teori keseimbangan kekuatan, kedua negara saling memperlihatkan kekuatan dan tekad untuk mengimbangi satu sama lain, menegaskan bahwa stabilitas global terancam jika salah satu pihak merasa terancam atau dilampaui (Levy, 2004).

dunia kini menyaksikan munculnya ideologi politik pribadi Xi Jinping, yang bertujuan untuk memperkuat posisinya dalam warisan Partai Komunis Tiongkok, sejajar dengan tokoh-tokoh seperti Mao Zedong atau Deng Xiaoping. 'Teori' Xi menekankan kebangkitan Tiongkok menuju status negara adidaya, yang tercermin dalam pernyataan Xi sendiri, seperti "Sudah saatnya bagi kita untuk menjadi pusat perhatian dunia dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi umat manusia." Hal ini menunjukkan bahwa Xi dengan percaya diri mengklaim bahwa negaranya kini telah menjadi kekuatan besar, sekaligus memperkuat budaya politik Tiongkok yang unik. Bagi Xi Jinping, demokrasi sosialis Tiongkok adalah sistem yang palingotentik dan efektif

untuk melindungi rakyatnya, tanpa perlu meniru sistem politik negara lain. Terkait Laut Cina Selatan, Xi menyoroti bahwa perkembangan pulau-pulau buatan yang dibangun oleh Tiongkok dalam lima tahun terakhir merupakan pencapaian signifikan, meskipun hal ini semakin meningkatkan ketegangan dengan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat (Levy, 2004).

Selanjutnya, menteri luar negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson menjelaskan bahwa Amerika akan memperdalam kerja samanya dengan India untuk menghadapi meningkatnya bahaya Cina di Asia. Menurutnya, pusat studi strategis dan internasional, yang merupakan masyarakat non demokratis dan Amerika harus mengakui India sebagai mitra potensial dalam hubungan ekonomi dan politik strategis yang tidak akan pernah terjadi dengan Cina (Levy, 2004)

Dengan sumber daya yang melimpah dan jangkauan global, Angkatan Laut AS memiliki kemampuan untuk menunjukkan kekuatannya di kawasan Pasifik. Namun, dalam hal Tiongkok, Angkatan Laut AS kesulitan untuk melibatkan kekuatan angkatan lautnya yang sedang berkembang. Armada AS di kawasan Pasifik melakukan lebih dari 700 kunjungan pelabuhan untuk pemeliharaan, kebebasan awak, dan kegiatan setelahnya. Kehadiran bendera AS pada kapal perang adalah simbol kekuatan dan menunjukkan hubungan AS dengan negara-negara yang dikunjungi, sebuah alat yang telah efektif digunakan selama lebih dari satu abad. Meski demikian, antara 1993 hingga 2011, Angkatan Laut AS hanya melakukan 14 kunjungan pelabuhan ke Tiongkok, angka yang sangat rendah dibandingkan dengan lebih dari 13.000 kunjungan ke negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan dalam periode yang sama. Hal ini mencerminkan kesulitan politik dalam memperoleh izin untuk kunjungan ke Tiongkok dan menunjukkan ketidakmampuan atau keengganan AS untuk menjalin hubungan yang serupa dengan Tiongkok, seperti yang berhasil dilakukannya dengan negara-negara lain yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan (Levy, 2004).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Laut Cina Selatan, dengan luas 3,5 juta km², adalah wilayah strategis yang penting sebagai jalur perdagangan utama dan kaya sumber daya alam, termasuk cadangan minyak 11 miliar barel dan gas alam 190 triliun kaki kubik. Sekitar sepertiga pengiriman dunia melewati kawasan ini, dengan transaksi senilai \$3 triliun per tahun. Konflik di wilayah ini dipicu oleh klaim sepihak Tiongkok atas wilayah yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara-negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Tindakan

Tiongkok memperluas yurisdiksinya menambah ketegangan dan mengancam stabilitas regional.

Amerika Serikat berperan dalam menjaga kebebasan navigasi dan mendukung negara-negara pengklaim lainnya, serta mendukung keputusan Pengadilan Arbitrase 2016 yang menolak klaim Tiongkok. Kebangkitan ekonomi dan militer Tiongkok memicu kekhawatiran global, terutama di kalangan kekuatan tradisional seperti AS dan sekutunya, yang berusaha menahan pengaruh Tiongkok di Laut Cina Selatan. Berdasarkan yang telah dijelaskan, disoroti bahwa penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan yang berkelanjutan dan bersifat mengikat bagi semua pihak terkait. Pentingnya diplomasi dan kerjasama internasional dalam menghadapi sengketa ini tidak dapat diabaikan, mengingat dampaknya terhadap stabilitas regional dan tatanan dunia secara keseluruhan.

Penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan diplomatik yang berkelanjutan dan kerjasama internasional, mengingat dampaknya terhadap stabilitas kawasan dan tatanan dunia. Secara keseluruhan, rivalitas antara AS dan Tiongkok di Laut Cina Selatan menciptakan ketegangan geopolitik dengan dampak luas bagi keamanan dan politik internasional.

DAFTAR REFERENSI

- Bahri, M. (2020). Kebijakan freedom of navigation Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan. *Wanua: Jurnal Hubungan Internasional*, 5, 123–145. <http://www.ibtimes.com/south-Tiongkok-sea-dispute-timeline>.
- Hidayat, A. R., Alifah, N., Rodiansjah, A. A., & Asikin, M. Z. (2024). Sengketa Laut Cina Selatan: Analisis realis terhadap perebutan kekuasaan, respon regional, dan implikasi geopolitik. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(2), 579–591. <https://doi.org/10.46799/JSA.V5I2.1041>.
- Hussein, A. F. F., & Al-Mamary, Y. H. S. (2019). Conflicts: Their types, and their negative and positive effects on organizations. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8(8).
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). Postur pertahanan negara. Dalam *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Kementerian Pertahanan RI.
- Levy, J. S. (2004). *Balance of power theory and practice in the 21st century* (Vol. 3). Stanford University Press.
- Malam, D. B. (2020). Theories, dimensions and causes of conflict: An overview. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 8(11).

- Mandagie, M. N. N. (2022). Konflik berkelanjutan dan pembangunan berkelanjutan melalui Laut China Selatan. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 7, 1–9.
- Nexon, D. H. (2009). The balance of power in the balance. *World Politics*, 61(2), 330–359. <https://doi.org/10.1017/S0043887109000124>.
- Nugraha, M. H. R., & Sudirman, A. (2016). Maritime diplomacy sebagai strategi pembangunan keamanan maritim Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 1(2), 175–182.
- Pradana, F. A., & Suprayogi. (2021). Critical discourse analysis on Chinese and American news websites reporting South China Sea territorial dispute. *Linguistics and Literature Journal*, 2(2).
- Raymond, M., & Welch, D. A. (2022). What’s really going on in the South China Sea? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 4(1), 214–239.
- Rizsa Sabilla, K., Rustam, I., & Munir, A. M. (2022). Strategi China dalam melindungi keamanan nasionalnya di wilayah sengketa Laut China Selatan. *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*, 4, 2775–0205.
- Sanjiwani, N. P. A., et al. (2022). Upaya diplomasi maritim pemerintahan Joko Widodo dalam mewujudkan pilar keamanan poros maritim dunia. *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*, 4(1), 27.
- Swaine, M. D. (n.d.). The 18th Party Congress and foreign policy: The dog that did not bark? *China Leadership Monitor*, 40, 1.
- Teixeira, V. (2019). The United States’ China containment strategy and the South China Sea dispute. *Central European Journal of International and Security Studies*, 13, 166–193.
- Utami, W. (2012). Upaya Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam meredam konflik Spratly Island. Universitas Hasanuddin.